

**JUDUL SKRIPSI DITULIS HURUF TIMES NEW ROMAN
UKURAN 12 BOLD KAPITAL**

**Oleh
Budi Sopan Santun
NIM. 17000000000**

Abstrak

Salah satu BUMD yang dimiliki Kota Tanjungpinang adalah PT. Tanjungpinang Makmur Bersama (PT. TMB). Dalam perjalanannya Pemko Tanjungpinang adalah pemilik saham dari PT. TMB tersebut. Dalam hal ini Pemko Tanjungpinang telah memberikan penyertaan modalnya sebanyak tiga kali yakni di tahun 2010, 2012, dan 2015. Sejak berdirinya PT. TMB yakni pada tahun 2010, PT. TMB belum pernah memberikan kontribusi PAD nya terhadap daerah. Padahal Pemko Tanjungpinang telah memberikan modal sebesar Rp. 6.600.000.000. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan penyertaan modal daerah terhadap PT. TMB pada tahun 2010, 2012, dan 2015 dengan menggunakan teori Nigro and Nigro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 10 orang serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam penelitian ini yakni kebijakan penyertaan modal daerah terhadap PT. TMB Kota Tanjungpinang pada tahun 2010 terlaksana secara baik, hal ini karena tidak ada faktor-faktor negatif yang mempengaruhi perumusannya. Penyertaan modal pada tahun 2010 ialah pemberian modal dasar yang berguna untuk pembentukan awal dan pembenahan PT. TMB yang baru diserahkan oleh Pemkab Bintan. Sedangkan pada tahun 2012, pelaksanaan perumusannya dikatakan kurang baik karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi yakni berupa tekanan dari luar, pengaruh sifat pribadi dan pengaruh kelompok luar. Pengaruh tersebut berasal dari partai politik, kelompok masyarakat pengguna jasa lapak BUMD serta pengutamaan kepentingan pribadi perumus kebijakan. Pada tahun 2015,

pelaksanaannya sudah berjalan baik, karena tidak ada faktor negatif yang mempengaruhinya. Penyertaan modal pada tahun 2015 ini merupakan penyertaan modal yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan eks karyawan Bintan yang menuntut pesangon.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Penyertaan Modal, Badan Usaha Milik Daerah.

Catatan:

Dibuat menggunakan 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia (Abstrak) dan Bahasa Inggris (Abstract).